

PROGRAM KERJA CALON KEPALA DAERAH DAN TIPOLOGI PEMILIH DALAM PILKADA

Bakran Suni

FISIP Universitas Tanjungpura, Jalan Ahmad Yani, Pontianak 78122, Telp. (0561) 571752, 571753,
Fax. (0561) 571752, e-mail: bakran_suni@yahoo.com

Abstract: Candidates Work Program Regional Head and Typology Voters in Local Elections.

This study aims to determine the work program of regional candidates, voters typologies and relations work programs regional head candidates with voters typology. Research using qualitative descriptive type of research can be referred to taxonomic research. Data were collected using depth interviews and questionnaires to 350 respondents from 14 counties and cities in West Kalimantan. The results showed that the election of regional head candidates is relation between the program of work delivered regional head candidates and the parties supporting candidates with voters typology. From four of typologies voters there for the rational typology and critical rational voters choose candidates for the first pair (the winner) for the winning pair work program is more oriented to the characteristics of rational and critical voter typology. Typology critical and rational voters support employment programs that promote regional head candidate logical solution to economic problems, education, welfare, culture and social equity income and less tied to traditional values approach, primordial ethnic origin and religion.

Key words: work program, typology of voters, policy strategy, election.

Abstrak: Program Kerja Calon Kepala Daerah dan Tipologi Pemilih dalam Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program kerja calon kepala daerah, tipologi pemilih dan hubungan program kerja calon kepala daerah dengan tipologi pemilih. Penelitian menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif yang bisa disebut juga penelitian taksonomik. Data dikumpulkan menggunakan depth interview dan penyebaran angket pada 350 responden dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpilihnya calon kepala daerah ada kaitannya antara program kerja yang disampaikan calon kepala daerah dan partai pendukung calon dengan tipologi pemilih. Dari 4 tipologi pemilih, maka tipologi pemilih rasional dan kritis memilih calon pasangan pertama (sebagai pemenang) karena program kerja pasangan pemenang lebih berorientasi pada ciri-ciri tipologi pemilih rasional dan kritis. Tipologi pemilih rasional dan kritis mendukung program kerja calon kepala daerah yang mengedepankan solusi logis permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial budaya dan pemerataan pendapatan dan tidak terlalu terikat pada pendekatan nilai-nilai tradisional, primordialisme asal usul suku dan agama.

Kata kunci: program kerja, tipologi pemilih, strategi kebijakan, pilkada.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan publik tertuang dalam visi dan misi program kerja calon kepala daerah di kawasan Kalimantan Barat. Program kerja setiap calon dapat mempengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan pilihan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Kajian yang menarik untuk program kerja calon kepala daerah dikaitkan dengan tipologi pemilih adalah Pemilihan Kepala Daerah secara langsung atau sering disingkat sebagai Pilkada langsung. Dalam kajian Pilkada langsung, beberapa kajian terdahulu kebanyakan dibagi ke dalam dua kategori besar,

yakni: (a) kajian Pilkada yang dibahas secara makro dan (b) Pilkada yang dikaji secara mikro (Firmanzah, 2010). Kajian dalam kategori pertama menaruh perhatian pada bahasan mengenai Pilkada secara umum (mekanisme dan proses Pilkada, monitoring dan evaluasi Pilkada, dan banyak lagi). Sementara itu, kategori kedua, menaruh perhatian pada topik yang spesifik dan tertentu yang berlandaskan pada studi-studi kasus di lapangan. Sedangkan posisi kajian ini berusaha berada pada titik tengah kedua kajian tersebut di atas. Di mana, di satu sisi akan mengkaji bagaimana pelaksanaan Pilkada dalam

perspektif makro; dan sisi lain kajian kasus-kasus dengan peran kelengkapannya untuk membicarakan narasi-narasi mikro.

Dalam kajian dari dua kategori Pilkada, seperti tersebut di atas, maka peneliti sebelumnya menyadari betul bahwa mereka tidak mungkin menulis dengan *exhaustive* tentang Pilkada melalui pendekatan-pendekatan baku yang seringkali di gunakan dalam teori-teori politik konvensional. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk membahas konstestasi politik di level nasional maupun lokal dalam literatur-literatur kebijakan publik mempengaruhi ranah politik di daerah, di antaranya *pertama*, pendekatan struktural fungsional. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan pisau analisis ini, yaitu bagaimana program kerja calon kepala daerah? Bagaimana tipologi pemilih tersebut, sehingga peneliti gunakan sebagai bagian daripada pendekatan untuk menjelaskan politik lokal Pilkada dalam menunjang kebijakan publik di daerah. *Kedua*, pendekatan struktural, yaitu menjelaskan apakah ada hubungan antara program kerja calon kepala daerah dengan tipologi pemilih dalam pilkada.

Terkait isu pilkada di Kalimantan Barat yang dihelat tanggal 20 September 2012 yang lalu, maka hal yang menarik untuk diteliti adalah keberhasilan dan kegagalan calon kepala daerah dipengaruhi identitas tipologi pemilih tawaran terhadap program kerja sebagai implementasi kebijakan publik. Dalam pencalonan tidak terdapat dari calon independen, ada yang mendaftar tetapi tidak memenuhi kuota pemilih yang disiapkan oleh calon independen tersebut. Adapun pasangan yang mengadu nasib terdapat 4 pasang calon yang masing-masing diusung oleh partai politik tunggal maupun koalisi partai politik. Empat pasangan tersebut adalah yang inkambent yaitu Cornelis via Cristiandy Sanjaya, Tambul Husein berpasangan dengan Barnabas, Armin Ali Anyang berpasangan Fathan A.Rasyid dan Morkes berpasangan dengan Burhanudin A.Rasyid. Beranjak dari fenomena tersebut maka yang menjadi permasalahan penelitian adalah apakah keberhasilan atau kegagalan calon kepala daerah dalam pilkada ada hubungannya dengan tipologi pemilih.

Keputusan pemilih yang juga menjadi kajian menarik, apabila ditelusuri dari identitas pemilih, yaitu sosial budaya, nilai tradisional, level pendidikan yang akhirnya mengacu kepada pada tipologi pemilih menjadi pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional dan pemilih skeptis. Tipologi inilah yang mempengaruhi program kerja pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam politik lokal di Kalimantan Barat. Program kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi (IAPW, 2011). Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Jika dikaitkan dengan kebijakan publik, program kerja adalah arahan akan suatu kebijakan dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan, baik itu berupa keluaran ketika pasangan calon menjual program kepada konstituen dalam mencapai sasaran baik berupa keluaran kebijakan (*policy output*) maupun hasil kebijakan (*policy outcome*).

Untuk dapat menentukan ketertarikan pemilih kepada calon gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada diukur dari kualitas program kerja yang ditawarkannya karena program kerja itu akan menjadi kebijakan pemerintah daerah setelah calon gubernur dan wakil gubernur terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur defenitif. Penilaian terhadap program kerja merupakan sesuatu yang penting, mulai dari tujuan, tahapan-tahapan yang dilakukan, implementasi yang dijalankan dan mampu mewujudkan tujuan kebijakan atau tidak (Sarah, 2010 dan Purwanto, 2012). Penyampaian informasi berupa program kerja dan kebijakan pasangan calon kepada konstituen menggunakan media pidato kampanye secara langsung, atau tidak langsung. Untuk itu analisis mendalam dan lebih komprehensif sangat dibutuhkan untuk memahami perilaku pemilih. Kondisi pemilih adalah dimensi yang sangat kompleks. Begitu banyaknya karakteristik pemilihnya akan menjadi terbatas jika hanya di-

dasarakan pada pendukung atau massa mengambang. Para pendukung maupun non-pendukung sebenarnya sama-sama memiliki karakteristik sebagai pemilih yang rasional dan non-rasional.

Firmanzah (2010) mengkaji tipologi pemilih dalam pilkada pemilih akan cenderung secara objektif memilih partai politik atau kontestan calon yang memiliki kepekaan terhadap masalah dan kejelasan program. Partai politik pengusung calon kepala daerah yang arah kebijakannya tidak jelas akan cenderung tidak dipilih. Sementara pemilih yang lebih mementingkan ikatan ideologi suatu partai atau seorang calon (kontestan), akan lebih menekankan aspek-aspek subjektivitas yang mempengaruhi pemilih.

Menurut perspektif di atas, dapat menganalisis karakter suatu masyarakat melalui perilaku individunya, karena perilaku individu merupakan cerminan dari masyarakat secara luas. Sementara perilaku individu dianggap memiliki derajat kebebasan yang cukup tinggi untuk berbeda dari lingkungannya. Karena setiap individu memiliki sistem nilai, kemampuan, cara berpikir, dan perilaku yang berbeda satu dengan yang lain. Lingkungan bukan menentukan perilaku individu, melainkan memengaruhinya. Keputusan akhir dari perilaku yang akan diambil ditentukan sendiri oleh setiap individu.

Zamroni (2007) menyebutkan tipologi adalah karakter yang unik dan spesifik yang melekat pada orang-orang tertentu yang membedakannya dengan orang lain dan pemilih adalah warga negara yang menyelurkan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Jadi tipologi pemilih, yaitu perilaku politik masyarakat yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah berusaha merebut hati rakyat dalam khazanah intelektual yang rasional dan non rasional. Masyarakat sebagai pemilih dalam pilkada, tentu tidak terlepas dari identitas pemilih yang di mulai dari kondisi sosial budaya pemilih. Pemilih yang rasional dapat dipengaruhi oleh program kerja calon kepala daerah yang mampu menawarkan kepada masyarakat untuk mengangkat kesejahteraan rakyat berbagai kawasan. Pemilih yang non-rasional sebaliknya bukan memperhatikan program kerja, tetapi lebih memperhatikan siapa yang besar memberikan bantuan ketika kampanye tertutup maupun hingga sampai kampanye terbuka kepada pemilih.

Tipologi selanjutnya adalah nilai tradisional pemilih (Chapman, 1983). Nilai tradisional dimaksudkan setiap pemilih memiliki warisan dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda satu sama lain. Hal ini tentu sangat mempengaruhi proses dalam diri masing-masing individu ketika menentukan pilihannya. Tingkat pendidikan dan ekonomi mempengaruhi pemilih dalam membuat keputusan. Individu yang tidak memiliki tingkat pendidikan tinggi akan cenderung menggunakan aspek non rasional dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor emosional, rumor isu, *stereotype*, dan pendapat umum merupakan hal penting dalam proses pengambilan keputusan politik mereka.

Sementara itu, pemilih yang memiliki level pendidikan relatif lebih tinggi akan cenderung lebih berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan. Kebenaran informasi yang diperoleh tidak begitu saja diterima. Mereka akan mencoba memverifikasi apakah informasi berasal dari sumber-sumber yang terpercaya atau tidak, sebelum mereka menganalisisnya. Lokasi geografis juga mempengaruhi cara setiap individu dalam menganalisis sesuatu. Mereka yang hidup di daerah perkotaan relatif sudah terbiasa dengan mengkonsumsi informasi beragam dan kontradiktif dibanding dengan individu yang hidup di pedesaan. Berdasarkan teori dan kondisi tersebut, maka terdapat empat tipologi pemilih yaitu pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional dan pemilih skeptis. Oleh karena itu, dukungan partai politik dalam pilkada sangat mempengaruhi daripada pemilih dalam pengambilan keputusan dalam memilih.

Hubungan pemilih dengan program kerja berpengaruh kepada keputusan konstituen dalam menentukan pilihan mereka. Model hubungan tipologi pemilih dengan program kerja tentu tertuang dalam mengkaji kebijakan publik yang sangat besar manfaatnya. Winarno (2007) menyatakan hubungan program kerja dengan tipologi pemilih sangat diwarnai oleh model yang ditawarkan calon yang mampu meyakinkan para pemilih. Pasangan calon yang mampu mengkomunikasikan program kerja sesuai dengan tipologi pemilih di Kalimantan Barat, akan mendapat dukungan yang banyak dari pemilih. Lalu dapat diterapkan menurut cara yang memungkinkan pengujian empiris dalam pilkada.

Sehubungan dengan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program kerja kepala daerah dan tipologi pemilih serta hubungan antara program kerja calon kepala daerah dan tipologi pemilih dalam pilkada di Kalimantan Barat.

METODE

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji program kerja, tipologi pemilih dan hubungan antara program kerja kepala daerah dengan tipologi pemilih dalam pilkada di Kalimantan Barat. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (*descriptive qualitative research*), yang biasa disebut juga penelitian taksonomik (*taxonomic research*). Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah *dept interview* dan *non participant observation*. Informan yang menjadi subjek penelitian adalah empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang berarti ada 8 orang, tim sukses 8 orang, partai politik pengusung sebanyak 16 orang pengurus partai politik maupun pemilih sebanyak 36 orang wawancara selain wawancara juga digunakan penyebaran angket kepada 350 orang pemilih pada 14 kabupaten/kota yang ditentukan secara acak di Kalimantan Barat. Data diinterpretasikan dengan metode interaktif dimulai dari reduksi data, display data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dianalisis dengan berbentuk deskriptif naratif dengan memperhatikan *life story* dari informan yang menjadi subjek penelitian.

HASIL

Untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai visi yang dituju diperlukan strategi kebijakan publik. Secara garis besar strategi program kerja dalam kebijakan publik adalah berupaya mengatasi permasalahan internal maupun eksternal dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang tersedia dengan memanfaatkan peluang yang ada serta berusaha mengatasi tantangan dengan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah di Kalimantan Barat. Pokok-pokok strategi kebijakan publik di Kalimantan Barat oleh para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Pertama, Strategi Kebijakan Pembangunan Wilayah.

Sesuai dengan keragaman kondisi geografis, demografis, permasalahan dan potensi daerah, maka rentang kendali strategi kebijakan pembangunan wilayah akan dibagi menjadi lima rentang kendali pembangunan atau wilayah pembangunan, yaitu perkotaan, pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan.

Kedua, Strategi Kebijakan Pengalokasian APBD.

Strategi kebijakan pengalokasian APBD yang akan ditempuh adalah pengalokasian anggaran yang berpihak kepada rakyat. Implementasinya; kebijakan anggaran untuk publik harus lebih besar daripada anggaran untuk aparatur, kebijakan anggaran harus memprioritaskan pada program yang mendorong peningkatan pelayanan publik, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan SDM dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

Ketiga, Strategi Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Strategi kebijakan pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana kesehatan, pendidikan, dan sosial yang merata, terjangkau dan berkualitas, khususnya bagi masyarakat miskin.

Keempat, Strategi Kebijakan Pengelolaan Pemerintahan

Strategi kebijakan dalam mengelola pemerintahan melalui; (a) Pendekatan kerakyatan dengan membangun sistem pelayanan publik yang mudah, cepat, efektif, efisien dan terintegrasi serta tertib administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku, agar terwujud pengelolaan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka mempercepat pembangunan daerah; (b) Menciptakan kelembagaan yang efisien dan efektif melalui pembangunan sistem manajemen pemerintahan tertib dan transparan; dan (c) Mendorong pemekaran wilayah bagi daerah yang memenuhi persyaratan undang-undang untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pembangunan.

Kelima, Strategi Kebijakan Pengembangan SDM

Strategi kebijakan fokus untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia yang telah bekerja maupun angkatan kerja yang akan memasuki lapangan pekerjaan terutama dalam penguasaan

ilmu pengetahuan praktis dan teknologi tepat guna melalui penyuluhan, pelatihan, praktek kerja/magang dan pendidikan formal melalui pengalokasian anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 20%.

Keenam, Strategi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Strategi pengelolaan Sumberdaya Alam melalui pendekatan pengelolaan yang berkelanjutan yang menyangkut aspek dimensi ekonomi, sosial dan ekologi. Pendekatan kebijakan yang dilakukan pengelolaan sumberdaya alam yang secara ekonomi layak atau menguntungkan, secara ekologi tidak menyebabkan kerusakan lingkungan (degradasi sumberdaya), dan secara sosial berkeadilan.

Ketujuh, Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Strategi kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pendekatan; (a) Kebijakan pengembangan sistem produktivitas sumber daya lokal secara profesional, khususnya pertanian yang mengarah kepada agribisnis; agroindustri, dan agrowisata, serta sumber daya lainnya secara efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; (c) Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan dan penanaman investasi dan dunia usaha; (d) Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk mendorong investasi dan mengembangkan dunia usaha.

Kedelapan, Strategi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Strategi kebijakan pembangunan infrastruktur dasar dilakukan dengan fokus; (a) Pada daerah-daerah sentra produksi dalam upaya untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat terhadap akses pasar; (b) Membangun infrastruktur yang fokus untuk mendukung sistem investasi dan aksesibilitas masyarakat terhadap program pembangunan daerah.

Kesembilan, Strategi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik

Strategi kebijakan dilakukan dengan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat secara tepat, adil, dan transparan yang didasarkan kepada prinsip kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kesepuluh, Strategi Kebijakan Pembangunan Aparatur Pemerintah Daerah

Strategi kebijakan pembangunan aparatur dilakukan dengan; (a) Memberikan penghargaan kepada aparatur yang berprestasi dan memiliki kinerja yang baik; (b) Menempatkan aparatur pada bidang-bidang pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas dengan menghilangkan *like and dislike*. Oleh karenanya reformasi birokrasi dengan menempatkan aparatur sesuai dengan kapasitas guna mewujudkan jenjang karir pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku menjadi kebijakan yang mutlak harus diambil terlebih dahulu.

Kesebelas, Strategi Kebijakan Pembangunan Investasi

Strategi kebijakan pembangunan investasi dilakukan dengan; (a) Mendorong peningkatan masuknya arus investasi khususnya investasi yang mengarah kepada upaya kegiatan di bidang pengembangan industri pengelolaan yang berbasis pertanian melalui langkah-langkah menghilangkan berbagai hambatan dan rancangan yang dapat menumbuhkan kegairahan berinvestasi; (b) Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan dan penanaman investasi dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah; (c) Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Keduabelas, Strategi Kebijakan Pembangunan Wilayah Perbatasan

Strategi kebijakan pembangunan wilayah perbatasan dilakukan melalui; (a) Pendekatan kesejahteraan dengan fokus meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi daerah; (b) Pendekatan keamanan dengan memantapkan ketertiban dan keamanan di wilayah perbatasan; (c) Mendorong terlaksananya Keputusan Presiden tentang Wilayah Perbatasan.

Dalam menentukan keputusan konstituen, maka dari dua belas program kerja calon gubernur hasil penelitian didapati adalah tipologi pemilih yang pertama, yaitu pemilih rasional memiliki ciri khas yaitu adanya ikatan ideologi kepada suatu partai politik yang mengusung pasangan calon dengan memperhatikan program kerja yang dipasarkan. Para pemilih rasional melakukan

penilaian yang valid terhadap visi, misi, dan program kerja kandidat (Ridwan, 2004). Kelompok masyarakat rasional ini didapati lebih besar di masyarakat perkotaan. Dengan latar pendidikan yang tinggi mempengaruhi keputusan akhir secara rasional untuk memilih calon pasangan gubernur dan wakil gubernur lebih mengedepankan program kerja yang pro rakyat. Kelompok pemilih rasional dapat pula menjadi bagian yang apabila tidak percaya dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dapat mengisi kelompok golput yang tidak mau memilih salah satu calon, walaupun program kerja lebih mereka perhatikan untuk menentukan pilihan dalam bilik kecil.

Hasil penelitian pemilihan kepala daerah Kabupaten Mimika (Papua) oleh Hartopo (2010) menunjukkan bahwa kemenangan pasangan calon kepala daerah dipengaruhi oleh visi dan misinya yang disampaikan pada masa kampanye. Apabila nantinya mereka terpilih dan tidak dapat melaksanakan program visi dan misinya maka mereka sanggup mengundurkan diri. Jadi program kerja pasangan kepala daerah dalam masa kampanye menjadi tolak ukur kebijakan kepala daerah setelah mereka terpilih menjadi kepala daerah.

Tipologi kedua adalah pemilih kritis mereka akan selalu menganalisis kaitan antara program kerja yang ditawarkan oleh calon pasangan melalui tim sukses maupun partai politik (ideologi) dengan kebijakan yang dibuat. Tiga yang akan terjadi ketika terdapat perbedaan antara nilai ideologi dengan platform partai politik dalam menawarkan program kerja, seperti sikap masyarakat yang tidak mudah tergoyahkan. Mereka lebih memilih program kerja yang baik dan langsung membawa perubahan dalam pembangunan yang pro rakyat di Kalimantan Barat.

Ketiga tipologi pemilih tradisional memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat program kerja dari calon yang diusung partai politik sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih calon dan wakil gubernur. Faktor figur yang sangat penting bagi kelompok ini, demikian pula faktor satu agama dan faktor satu suku juga menjadi ciri daripada

pemilih tradisional yang sangat rentan dan tidak memandang penting program kerja yang ditawarkan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kebijakan semisal ekonomi, kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan pendidikan, dan pengurangan angka inflasi dianggap sebagai parameter kedua.

Dalam penelitian Hamid (2011) tentang pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten, ciri tipologi pemilih tradisional inilah yang memenangkan calon kepada daerah, dimana dalam kampanyenya pesan-pesan yang diangkat melalui berbagai media lebih menonjolkan figur/pribadi calon kepala daerah daripada visi dan misi pemerintah. Sedangkan temuan penelitian ini ternyata calon kepala daerah yang menang adalah dipilih oleh tipologi pemilih rasional yang lebih tertarik pada program kerja daripada faktor figur, suku, dan agama.

Tipologi keempat pemilih skeptis, yaitu terdapat banyak pemilih skeptis yang masa bodoh dan ragu-ragu dalam menentukan pilihannya, serta keengganan pemilih untuk memberikan suaranya, sehingga terjadi tingginya angka golput. Tingginya angka golput merupakan salah satu indikasi atas ketidakpercayaan masyarakat pada institusi-institusi politik, khusus beberapa calon yang menawarkan program kerjanya dalam kampanye.

Aktivitas penyampaian program kerja dengan tipologi pemilih dalam pilkada di Kalimantan Barat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur ternyata terdapat hubungan yang sangat signifikan terpilihnya salah satu pasangan calon. Program kerja sangat menentukan bagi terpilihnya salah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur di Kalimantan Barat. Jika dihubungkan dengan tipologi pemilih maka tipologi pemilih rasional dan tipologi pemilih kritis, hampir bertempat tinggal di perkotaan, pesisir sepanjang kawasan Kalimantan Barat. Kelompok tipologi pemilih tradisional berada di pedalaman sebagian pesisir dan sebagian di perkotaan dan kelompok ini tidaklah mayoritas. Kelompok ini dalam penentuan pilihan calon gubernur dan wakil gubernur lebih didasarkan pada pertimbangan faktor suku, agama, dan primordialisme. Tipologi pemilih skeptis termasuk angka golput tertinggi bertempat tinggal di

perkotaan, sebagian di pesisir pedalaman. Kelompok ini dapat ditemukan di Kabupaten Sintang tepatnya di Kecamatan Tebelian dimana dua TPS masyarakatnya dan petugas TPS tidak mau datang untuk memilih salah satu calon pasangan gubernur dan wakilnya dengan alasan tidak ada yang kenal dengan calon-calon pasangan. Hasil penelitian melalui penyebaran angket kepada responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Hasil angket pada empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur di Kalimantan Barat (Tabel 1), pemilih tertarik pada program kerja dari empat belas kabupaten dan kota adalah 113 responden atau 32,29% didominasi oleh tipologi pemilih rasional dan tipologi pemilih kritis dimenangkan oleh pasangan urutan pertama Cornelis-Cristiandy Sanjaya. Sedangkan pasangan urutan kedua Armyn Ali Anyang-Fathan A.Rasyid yaitu 68 responden atau 19,43% dan pasangan

urutan ketiga Morkes-Burhan A.Rasyid dan keempat Abang Tambul-Barnabas Simin masing-masing 97 responden atau 27,71% dan 72 responden atau 20,57% lebih didominasi tipologi pemilih tradisional.

PEMBAHASAN

Analisis mendalam dan lebih komprehensif berpengaruh kepada pencitraan pemilih kepada calon gubernur dan wakil gubernur dalam menyampaikan program kerja setiap kampanye sangat dibutuhkan untuk memahami keputusan pemilih. Untuk dapat menentukan tinggi-rendahnya ketertarikan masyarakat sebagai pemilih terhadap program kerja yang disampaikan beberapa pasang calon gubernur dan wakil gubernur tergantung tipologi pemilih.

Pemilih rasional yang memiliki ciri khas mementingkan isu program kerja yang disampaikan calon gubernur dan wakil gubernur di Kali-

Tabel 1. Pendapat Responden Pemilih tentang Program Kerja Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Kalimantan Barat

No	Nama Kabupaten /Kota	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dipilih Sesuai Program Kerja			
		C.C. %	A.F. %	M.B. %	A.B. %
1	Kota Pontianak	4	12	6	3
2	Kab. Pontianak	7	6	8	4
3	Kab. Kubu Raya	7	6	7	5
4	Kota Singkawang	6	8	7	4
5	Kab. Bengkayang	11	4	5	5
6	Kab. Sambas	4	5	12	4
7	Kab. Landak	13	2	5	5
8	Kab. Sanggau	11	4	6	4
9	Kab. Sekadau	11	4	4	6
10	Kab. Sintang	12	3	5	5
11	Kab. Melawi	8	5	6	6
12	Kab. Kapuas Hulu	6	3	5	11
13	Kab. Ketapang	9	3	8	5
14	Kab. Kay. Utara	4	3	13	5
Jumlah		113 32,29%	68 19,43%	97 27,71%	72 20,57%

Sumber: Angket Empat Belas Kota/Kabupaten di Kalbar

Catatan: C.C. = Cornelis, Cristiandy Sanjaya, M.B. = Morkes, Burhan A. Rasyid, A.F. = Armyn Ali Anyang, Fathan A.Rasyid, A.B. = Abang Tambul, Barnabas Simin

mantan Barat pada 20 September 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 57,63% rakyat memilih berdasarkan program kerja, dibandingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik. Faktor seperti paham, asal-usul atau suku, nilai tradisional, budaya, agama dalam kelompok pemilih tradisional hanya 24,56%. Pemilih rasional dalam hal ini ingin melepaskan hal-hal yang bersifat dogmatis, ‘tradisional,’ dan ikatan lokasi dalam kehidupan politiknya. Analisis kognitif dengan pertimbangan logis sangat dominan dalam proses pengambilan keputusan. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh calon dalam membawa isu-isu program kerja yang berhubungan erat dengan faktor pendukung kemenangan salah satu calon. Mereka harus mengedepankan solusi logis layanan publik dengan isu masalah ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial budaya, pemerataan pendapatan, dis-integrasi masyarakat.

Bagi pemilih tradisional mereka tidak lagi memperhatikan program kerja, akan tetapi tradisional pemilih (Chapman, 1983). Nilai tradisional pemilih berpendapat bahwa “setiap pemilih memiliki warisan dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda satu sama lain. Hal ini tentu sangat mempengaruhi proses dalam diri masing-masing individu ketika menentukan pilihannya. Tingkat pendidikan dan ekonomi tentu mempengaruhi pemilih dalam membuat keputusan.” Individu yang tidak memiliki tingkat pendidikan tinggi akan cenderung menggunakan aspek non rasional dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor emosional, rumor isu, *stereotype*, dan pendapat umum merupakan hal penting dalam proses pengambilan keputusan politik mereka.

Sementara itu, pemilih yang memiliki level pendidikan relatif lebih tinggi akan cenderung lebih berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan. Kebenaran informasi yang diperoleh tidak begitu saja diterima. Mereka akan mencoba memverifikasi apakah informasi berasal dari sumber-sumber yang terpercaya atau tidak, sebelum mereka menganalisisnya. Lokasi geografis juga mempengaruhi cara setiap individu dalam menganalisis sesuatu. Mereka yang hidup di daerah perkotaan relatif sudah terbiasa dengan mengkonsumsi informasi beragam dan kontra-

diktif dibanding dengan individu yang hidup di pedesaan. Berbekal dari kondisi tersebutlah akan melahirkan pemilih, pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional dan pemilih skeptis. Oleh karena itu, program kerja yang disampaikan calon gubernur dan wakil gubernur disertai dukungan tim sukses dan partai politik pada pilkada sangat mempengaruhi daripada pemilih dalam pengambilan keputusan untuk memilih salah satu pasangan calon.

Dukungan isu-isu program kerja serta partai politik menurut Firmanzah (2008) adalah faktor penting bagi sukses dalam pilkada yang mengusung calon kepala daerah. Artibut ideologi, dan kualitas para politikusnya akan sangat memengaruhi penilaian masyarakat atas program kerja dan partai politik pendukungnya. Seringkali masyarakat mencampuradukkan kualitas figur si politikus dengan program kerja maupun partai politik yang menjadi kendaraannya. Hal yang paling mudah dinilai oleh masyarakat memang tergantung pada setiap aktivitas dan perilaku yang diperbuat para kualitas politikusnya. Kualitas orasi, program kerja, kepedulian, sikap yang ditunjukkan oleh politikus seringkali menjadi barometer untuk mengukur kualitas program kerja dan partai politik. Sementara itu program kerja serta integrasi, adaptasi dan campuran akan mewujudkan pembangunan politik masyarakat.” Integrasi menyatukan pola dukungan antara program kerja disertai partai politik pendukung dalam pilkada, sedangkan adaptasi adalah makna daripada kemampuan dukungan partai politik kepada calon gubernur dan wakil gubernur yang mampu mempengaruhi perilaku pemilih.

Dalam konteks tersebut di atas, bahwa kemajuan atau pencapaian tujuan suatu kebijakan dalam program kerja akan membantu dalam mengenali kemajuan dalam pencapaian tujuan suatu kebijakan. Kebijakan publik didukung program kerja partai politik membutuhkan waktu yang tidak panjang dan merupakan hasil dari akumulasi informasi ketika kampanye serta kinerja dalam jangka waktu yang lama. Faktor seorang pemimpin dari partai politik juga mempengaruhi pemilih. Seorang leader bisa memberikan gambaran dan petunjuk singkat tentang kualitas partainya maupun program kerja yang tampil dalam pilkada. Hal ini menjadi sangat penting

bagi pemilih, ketika mereka dihadapkan kepada pilihan serta situasi penting calon gubernur dan wakil gubernur dengan partai politik mana dalam pengambilan keputusan pemilih. Tipologi di atas sangat penting dalam mempengaruhi pemilih terhadap suatu program kerja ketika disampaikan dalam kampanye oleh tim partai politik dan calon dalam pilkada. Cara memengaruhinya akan sangat tergantung pada kadar masing-masing faktor. Ketika media massa sangat berperan dalam pembentukan opini publik dalam suatu masyarakat, faktor ini sangat memengaruhi cara bersikap dan bertindak masyarakat. Sedangkan ketika faktor keluarga yang lebih kuat dan masing-masing individu hidup di dalamnya, pendidikan dalam keluarga sangat menentukan pilihan-pilihan politik.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa penyampaian program kerja gubernur dan wakil gubernur sangat berpengaruh bagi menentukan keberhasilan calon mempengaruhi pilihan rakyat dalam menentukan coblosan ketika di bilik kecil pada tanggal 20 September 2012. Oleh karena itu peran tim sukses bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sangat penting untuk mempengaruhi hati rakyat memilih secara rasional atas pilihannya. Pengaruh program kerja yang pro rakyat dengan menerapkan bagi kepentingannya, serta menerapkan budaya keterbukaan dalam praktek pelaksanaannya. Sebab rakyat akan selalu mengamati dan memantau sejauhmana praktek pelaksanaan program kerja kedepan bagi lima tahun untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan visi dan misi dari keempat calon gubernur dan wakil gubernur tersebut.

Kelompok pemilih rasional adalah kelompok yang mengutamakan partai politik yang lebih dewasa dan mapan dalam menawarkan program kerja mereka. Sehingga para kelompok rasional ini kelompok yang terdidik, artinya mereka dapat memberikan penilaian secara langsung serta mengevaluasi sebelum masa pilkada. Kelompok ini lebih melihat realita partai politik, program kerja dan figur yang lebih mementingkan kepentingan rakyat tanpa melihat suku, agama maupun tradisi budaya masyarakatnya. Sesungguhnya masyarakat menginginkan figur kepala daerah yang benar-benar memiliki komitmen yang kuat untuk membangun daerah dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat (Agus, 2010). Kelompok masyarakat melalui pemilih rasional lebih menguji kemampuan program kerja calon, kemampuan calon untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat di perkotaan, pesisir, pedalaman dan perbatasan. Oleh karena itu tim sukses bagi mereka adalah orang-orang yang mampu meyakinkan mereka sebagai pemilih yang terpelajar dan terdidik. Demikian pula mereka akan menilai partai politik apa yang mengusung mereka sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Kemapanan partai politik serta perilaku para pengurusnya hingga mereka terpilih sebagai wakil rakyat di legislatif selalu menjadi sorotan mereka pula. Tidak mengherankan apabila ada pengurus dan kawan partai politik dan legislatif keliru dalam mengambil keputusan. Maka konsekuensinya mereka tidak akan terpilih kembali sebagai calon wakil rakyat, maupun menjadi kepemimpinan masa depan yang selalu mereka harapkan.

Masyarakat di empat belas kota dan kabupaten di Kalimantan Barat lebih dominan mengarah kepada pemilih rasional, mereka mengkaji jauh lagi daripada perkiraan partai politik, para calon, maupun di mana mereka di tuntut mampu mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kota. Mereka ingin melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap program kerja yang telah terlaksana maupun mana belum terlaksana.

Pemilih kritis ini telah dikelompokkan kepada pemilih yang aktual, menilai program kerja yang telah dilakukan oleh partai politik, calon yang telah menduduki jabatan yang sama maupun calon yang dianggap mampu melakukan program kerja yang ril dan calon-calon yang mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kawasan di berbagai daerah. Mereka lebih melihat kebijakan dalam mengatasi infrastruktur fasilitas jalan hingga kawasan-kawasan yang mampu mensejahterakan rakyat. Dari hasil wawancara dan angket yang disebar di empat belas kota dan kabupaten, pemilih yang kritis lebih tertarik kepada hal-hal yang baru sifatnya. Artinya para calon itu adalah orang-orang yang dianggap mampu melakukan tugas-tugas sebagai pemimpin harapan mereka. Para pemilih di Kota Pontianak ini ingin calon gubernur dan wakil gubernur

adalah yang mampu membuat komitmen yang nyata bagi kemajuan daerah, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.

Program kerja menjadi sorotan yang paling tinggi adalah yang menawarkan program kerja jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, sejauhmana para calon gubernur dan wakil gubernur ini dapat melakukan program kerja mereka lebih nyata bagi perubahan. Perubahan yang mereka maksud adalah mengutamakan program pendidikan, program kesehatan, program kesejahteraan rakyat, penyiapan lapangan kerja yang berpihak kepada rakyat. Meskipun juga mengundang para investor yang lebih banyak berpihak kepada rakyat kecil, agar tidak terjadi ketimpangan dalam hal kesejahteraan

Tipologi pemilih tradisional masih sangat kental dengan budaya yang tinggi, dimana faham masyarakat masih didominasi oleh ideology tanpa melihat program kerja maupun kebijakan partai politik. Hasil wawancara dan angket yang disebar di empat belas kota dan kabupaten, masih sangat tinggi dipengaruhi oleh faktor agama dan suku serta kebudayaan calon gubernur dan wakil gubernur. Pemilih tradisional di empat belas kota dan kabupaten ini masih didapati juga, ketika mengambil keputusan memilih satu calon lebih mendapat arahan dari para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama yang berpengaruh yang mampu merubah perilaku mereka di bilik kecil.

Pemilih tradisional yang terdapat di empat belas kota dan kabupaten di Kalimantan Barat adalah merupakan bagian yang penting bagi arahan tingkat kedekatan dengan figur, kedekatan sosial budaya, nilai yang boleh membawa keuntungan yang mengandung nilai material. Demikian pula yang lebih tampak adalah asal usul daripada calon yang mau didukung, kefahaman kepada agama yang dianut oleh masyarakat dan calon, begitu pula orang-orang yang duduk di partai politik bukan melihat kepada program kerja, akan lebih melihat suku dan agama orang yang duduk di partai politik. Hal yang demikian inilah menjadi ciri-ciri daripada pemilih yang tradisional mengutamakan faham primordialisme begitu dalam dan tinggi. Kelompok masyarakat yang masih kental dengan faham primordial masih didapati di kawasan pinggiran empat belas Kota dan kabupaten di Kalimantan Barat.

Tipologi pemilih skeptis adalah kelompok yang pemahaman ideologis mereka sangat rendah. Mereka yang terdapat di empat belas Kota dan kabupaten dikelompokkan kepada pemilih yang mudah tidak percaya, tidak puas dengan apa yang telah dibuat oleh calon dan partai politik yang mengusung mereka. Pada kelompok pemilih skeptis lebih didominasi oleh kelompok kelas tinggi juga, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan pengaruh di masyarakat. Kelompok ini selalu apriori terhadap partai politik, kelompok legislatif, fihak pemerintah maupun juga kepada calon gubernur dan wakil gubernur yang sedang mengikuti pilkada saat ini. Tipologi pemilih skeptic ini di empat belas kota dan kabupaten tidak memberikan suaranya lebih dari 30% atau dengan kata lain tidak melakukan tugas mereka sebagai warga negara yang baik. Dari pengamatan langsung mereka juga datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) mereka ada yang memilih tapi suaranya rusak, dan tidak mencoblos surat suara. Kondisi seperti ini, maka pemilih skeptis di empat belas kota dan kabupaten dapat digolongkan kepada Golongan Putih (Golput), alias kelompok yang sangat selalu tidak puas dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, partai politik, maupun calon sudah menduduki jabatan gubernur dan wakil gubernur.

SIMPULAN

Program kerja yang disampaikan oleh calon gubernur dan wakil gubernur dalam kampanye pilkada di Kalimantan Barat merupakan parameter bagi pemilih dalam menetapkan pilihannya pada salah satu pasangan calon karena program kerja adalah salah satu bentuk pemerintah daerah kedepan setelah calon gubernur dan wakil gubernur terpilih menjadi kepala daerah. Program kerja calon gubernur dan wakil gubernur yang berorientasi pada tipologi pemilih ternyata memperoleh suara terbanyak. Dari empat tipologi pemilih dalam pilkada Kalimantan Barat, calon gubernur dan wakil gubernur yang mendapat suara terbanyak program kerja yang berorientasi pada tipologi pemilih rasional dan tipologi pemilih kritis. Kedua tipologi ini menilai program kerja calon gubernur dan wakil gubernur yang berorientasi pada pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat

(*policy problem solving*) dan menilai kinerja partai politik pendukung masa lampau. Tipologi ini tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Faktor asal usul, budaya, agama, suku, dan nilai-nilai tradisional memang dipertimbangkan juga tetapi bukan yang signifikan. Analisis kognitif dan pertimbangan logis sangat dominan dalam pengambilan keputusan. Hal yang penting bagi pemilih adalah mengedepankan solusi logis mengenai permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, sosial budaya, dan pemerataan pendapatan. Walaupun ada sebagian kelompok ini menganalisis kaitan antara sistem nilai partai politik (*ideology*) dengan kebijakan atau program kerja yang dibuat, namun mereka tetap melakukan kritik internal terhadap kebijakan tertentu atau kontestan dalam kebijakan pemerintah. Pemilih tipologi ini kebanyakan mereka yang pendidikan relatif tinggi dan tinggal di daerah perkotaan.

Tipologi tradisional lebih mengedepankan orientasi ideologi dari pada program kerja. Pemilih tradisional mengutamakan kedekatan sosial budaya, nilai-nilai tradisional, asal usul, suku dan agama sebagai ukuran untuk memilih salah satu pasangan calon kepala daerah. Mereka tidak memandang penting program kerja yang ditawarkan oleh calon gubernur dan wakil gubernur. Kebijakan ekonomi, kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan pendidikan dianggap sebagai parameter kedua. Sedangkan tipologi skeptis adalah mereka yang masa bodoh dan ragu-ragu dalam penentuan pilihannya serta keenganan memberikan suaranya sehingga terdapatlah angka golput yang tinggi. Kemenangan calon gubernur dan wakil gubernur yang program kerjanya berorientasi pada tipologi pemilih tidak terlepas dari dukungan partai politik pendukung calon. Implikasinya adalah bahwa program kerja yang dibuat gubernur dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah setelah mereka menjadi gubernur dan

wakil gubernur defenitif akan dipengaruhi oleh kebijakan atau program partai politik yang bersangkutan. Sejauh mana pengaruh partai politik pendukung calon gubernur dan wakil gubernur dalam formulasi dan implementasi kebijaksanaan pemerintahan daerah perlu pengkajian lebih lanjut karena pemerintah adalah sebagai lembaga pelaksana dari apa yang telah digariskan oleh lembaga politis (*legislatif*).

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hamid. 2010. "Politisasi Birokrasi dalam Pilkada Banten." *Jurnal JIANA*, 11 (2)
- Agus Hartopo. 2010. "Evaluasi Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mimika Papua". *Jurnal Binapraja*, 11 (1)
- Asep Ridwan. 2004. Memahami Perilaku Pemilih pada Pemilu 2004 di Indonesia". *Jurnal Demokrasi & HAM*, 4 (1)
- Chapman, R.G. & Palda, K.S. 1983. "Electoral Turnout in Rational Voting and Consumption Perspectives". *Strategic Management Journal*, 9 (3)
- Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Purwanto, E.A. 2004, "Revitalisasi Studi Implementasi Kebijakan". *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 8 (2)
- Sarah Chairinnisa. 2010. "Evaluasi Pendahuluan terhadap Aspek Fisik dan Kelembagaan Program Pengembangan Destinasi Percontohan Muaro Jambi". *Jurnal Bisnis & Birokrasi*, 17 (2)
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zamroni. 2007. "Penentuan Tipologi Pemilih PPP Kabupaten Jepara: Sebuah Strategi Pemenangan Pemilihan Umum", *Tesis*, tidak dipublikasi. Program Magister Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Diponegoro.